



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN MALANG

HARI : KAMIS

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2024

PUKUL : 10.00 WIB

TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA

**AGENDA : PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN
ANTARA BUPATI MALANG DAN DPRD
KABUPATEN MALANG TERHADAP RANCANGAN
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) SERTA
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2025**

A. PIMPINAN RAPAT



Nama : DARMADI, S.Sos
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN MALANG

B. SEKRETARIS RAPAT



NAMA : EKO DARMAWAN
Jabatan : SEKRETARIS RAPAT

C. ANGGOTA SESUAI FRAKSI

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN	PARTAI
1	DARMADI, S.Sos.	Ketua DPRD	PDI.P
2	Ir. H.M. KHOLIQ	Wakil Ketua	PKB
3	MISKAT , SH.MH	Wakil Ketua	GOLKAR
4	SODIKUL AMIN	Wakil Ketua	NASDEM
5	VENNY AYU SORAYA	Anggota	PDI.P
6	Hj.SUMA'I	Anggota	PDI.P
7	FATHUR ROHMAN , S.Pd.I	Anggota	PDI.P
8	BUSILAN , S.H	Anggota	PDI.P
9	Ir. BUDI KRISWIYANTO	Anggota	PDI.P
10	SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H	Anggota	PDI.P
11	Dr. TANTRI BARAROH, SE, M.Si., M.AK.	Anggota	PDI.P
12	Dra. Hj.TUTIK YUNARNI	Anggota	PDI.P
13	RENI PUWINING TYAS	Anggota	PDI.P
14	WAHYU INDRIYATI	Anggota	PDI.P
15	YULIS FARIDA, SH	Anggota	PDI.P
16	KUNCORO, S.H	Anggota	PKB
17	NOFAN EKO PRASETYO	Anggota	PKB
18	MAHRUS ALI	Anggota	PKB
19	Hj. MASFUFAH, S.Pd.	Anggota	PKB
20	Drs. ABDUL ROKHIM	Anggota	PKB
21	MUSLIMIN, S.Pd.	Anggota	PKB
22	SUSIYONO	Anggota	PKB
23	ABDULLOH SATAR	Anggota	PKB
24	Drs. MOKHAMAD FAUZI, M.Ag.	Anggota	PKB
25	ALI MURTADLO, S.H	Anggota	PKB
26	H. ABU HANIF, S.Pd.I	Anggota	PKB
27	AHMAD FAUZAN, S.Sos.	Anggota	GOLKAR
28	DIAS WIDY WIRA ANDIANTO, S.Ap.	Anggota	GOLKAR
29	SUDARMAN, S.Pd.	Anggota	GOLKAR
30	DOFIC SOROANGGOMO	Anggota	GOLKAR
31	M. KHOIRUN, S.E	Anggota	GOLKAR
32	Ir. SUDJONO,MP	Anggota	GOLKAR
33	AGUSTINUS SURYA PRIHANTA	Anggota	GOLKAR
34	NINIK NURMIATI	Anggota	NASDEM
35	SA'RONI	Anggota	NASDEM
36	ABDUL GHOFUR	Anggota	NASDEM
37	H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum.	Anggota	NASDEM
38	MUHAMMAD FAIZ, S.E.	Anggota	NASDEM
39	AMARTA FAZA, S.T.	Anggota	NASDEM
40	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	Anggota	GERINDRA
41	RAHMAT KARTALA	Anggota	GERINDRA
42	FITRI YUHANA	Anggota	GERINDRA
43	UNGGUL NUGROHO, S.Si.	Anggota	GERINDRA
44	MOHAMMAD. SAIFUL EFFENDI	Anggota	GERINDRA
45	ZIA'UL HAQ	Anggota	GERINDRA
46	JOKO EKO SUJARWANTO	Anggota	GERINDRA

47	H. AHMAD DANIYAL	Anggota	PPP
48	M. TAUFIQ, S.PD.I	Anggota	PPP
49	H. HADI MUSTOFA, S.Kom.	Anggota	DEMOKRAT
50	SUTRISNO, S.H.	Anggota	HANURA
Jumlah		50 orang	8 PARPOL

D. SAMBUTAN KETUA DPRD KABUPATEN MALANG



- **ASSALAMU'ALAIKUM WR, WB.**
- **SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA,**
- **OM SWASTYASTU,**
- **NAMO BUDDHAYA,**
- **SALAM KEBAJIKAN,**
- **RAHAYU.**

RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SESUAI CATATAN DI SEKRETARIAT DPRD, DARI 50 ORANG ANGGOTA DPRD YANG TELAH MENANDATANGANI DAFTAR HADIR ADA 28 ORANG, DENGAN DEMIKIAN TELAH MEMENUHI KUORUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 131 AYAT (1) HURUF **b**, PERATURAN DPRD KABUPATEN MALANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN MALANG, MAKA DENGAN MENGUCAP “**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIM**” RAPAT PARIPURNA DPRD PADA HARI INI, KAMIS TANGGAL 15 AGUSTUS 2024, SAYA NYATAKAN DIBUKA..... **(TOK!!! 1 X)**

YANG TERHORMAT,

SDR. BUPATI MALANG

SDR. WAKIL BUPATI MALANG;

SDR. PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MALANG; ATAU YANG MEWAKILI;

SDR. PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG;

SDR. Pj. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI BUPATI, ASISTEN
SEKRETARIS DAERAH, DAN PARA PEJABAT STRUKTURAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;

REKAN-REKAN PERS, HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI, MARILAH KITA
MENGUCAP PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA BERKAT RAHMAT,
TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA, KITA MASIH DAPAT MENGHADIRI RAPAT
PARIPURNA DPRD DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT.

SHOLAWAT SERTA SALAM SENANTIASA TERCURAHKAN KEPADA
JUNJUNGAN KITA NABI MUHAMMAD SAW. BESERTA KELUARGA, SAHABAT
DAN PENERUS PERJUANGAN BELIAU HINGGA AKHIR ZAMAN.

ATAS NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAMI MENGUCAPKAN
TERIMAKASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA
SAUDARA BUPATI, WAKIL BUPATI, JAJARAN FORKOPIMDA DAN PARA
UNDANGAN ATAS KEHADIRANNYA PADA RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI.

***SAUDARA BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN HADIRIN SEKALIAN YANG
BERBAHAGIA,***

BERDASARKAN PENGUMUMAN PADA RAPAT RAPAT PARIPURNA
TANGGAL 23 JULI 2024, MAKA AGENDA RAPAT PARIPURNA HARI INI ADALAH
**PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA BUPATI MALANG DAN
DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM**

APBD (KUA) SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2025.

RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRIN SEKALIAN

MEMASUKI ACARA YANG PERTAMA, KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN LAPORAN DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM (KUA) SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2025

UNTUK ITU, KEPADA JURU BICARA YANG TELAH DITUNJUK, DIPERSILAHKAN

.....Proses Penyampaian Hasil Pembahasan DPRD terhadap Rancangan KUA dan PPAS TA. 2025, oleh Juru Bicara DPRD.....



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Selamat Siang dan salam sejahtera Bagi Kita Semua, Syaloom, Om Swastiastu, Namo Buddaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

- Yang terhormat
- BUPATI MALANG;
 - WAKIL BUPATI MALANG;
 - SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALANG;

- PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MALANG;
- SAUDARA PJ. SEKRETARIS DAERAH DAN PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG; SERTA
- REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya atas Limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya semata, kita sekalian pada hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para penerus perjuangannya.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Tertib, serta sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD, maka pada hari ini Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil pembahasan atas Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025 yang telah dilaksanakan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada beberapa waktu yang lalu.

Kami selaku Juru Bicara menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan.

Saudara Bupati, Wakil Bupati dan hadirin sekalian yang kami hormati,

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran untuk perencanaan Pembangunan yang berkesinambungan melalui indikator kinerja utama dan Indikator Kinerja Daerah beserta targetnya. Tema Pembangunan dalam RKPD Kabupaten Malang Tahun 2025 adalah “Peningkatan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kebermanfaatan Teknologi yang Berkelanjutan”.

Yang kemudian dijabarkan dalam 6 (enam) Prioritas Pembangunan Sebagai berikut :

1. Pengentasan Kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja dengan memperbaiki iklim investasi dan potensi daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi;

4. Peningkatan pelayanan publik melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif berbasis digital;
5. Terwujudnya masyarakat yang tentram, tertib dan rukun berlandaskan agama, nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal untuk mendukung stabilitas politik dan keamanan;
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Selanjutnya, Kerangka ekonomi makro daerah sebagai asumsi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2025, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,0% - 5,3%;
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,44 – 72,74;
- Tingkat Kemiskinan sebesar 8,55% - 8,8%
- Indeks Gini sebesar 0,313 – 0,315;
- Tingkat Pengangguran Terbuka 3,83-4,35%;
- Pendapatan Perkapita Riil sebesar 30 Juta 658 Ribu 698 Rupiah.

Saudara Bupati, Wakil Bupati dan hadirin sekalian yang kami hormati,

Berikut kami sampaikan Rekapitulasi Perangkaan yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 yang merupakan hasil Pembahasan antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang, sebagai berikut:

I. PENDAPATAN

Kebijakan Pendapatan Daerah tahun 2025 diarahkan untuk :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
2. Memantapkan kelembagaan dan system operasional pemungutan pendapatan daerah berbasiskan pada pemanfaatan teknologi informasi yang modern;
3. Meningkatkan kualitas SDM;
4. Mengoptimalkan peran dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
5. Sosialisasi, edukasi dan meningkatkan pelayanan serta perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
6. Meningkatkan pengelolaan asset daerah;
7. Meningkatkan pengelolaan asset daerah.

Pendapatan Tahun 2025 direncanakan sebesar 5 Trilyun 13 Miliar 926 Juta 93 Ribu 559 Rupiah turun 0,17% atau sebesar 8 Miliar 541 Juta 951 Ribu 921 Rupiah dari penyampaian awal sebesar 5 Triliun 22 Miliar 468 Juta 45 Ribu 480 Rupiah yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah semula direncanakan sebesar 1 Triliun 61 Miliar 443 Juta 966 Ribu 888 Rupiah naik 10,8% menjadi sebesar 1 Triliun 176 Milyar 86 Juta 23 Ribu 57 Rupiah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer direncanakan sebesar 3 Trilyun 828 Miliar 46 Juta 797 Ribu 502 Rupiah turun 3,12% atau sebesar 123 Miliar 184 Juta 8 Ribu 90 Rupiah 84 Sen dari penyampaian awal sebesar 3 Triliun 951 Miliar 230 Juta 805 Ribu 592 Rupiah.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada Tahun 2025 direncanakan sebesar 9 Miliar 793 Juta 273 Ribu Rupiah pada pos Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

II. BELANJA

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada pengelolaan belanja yang dilaksanakan dengan pola proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Adapun kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2025 diarahkan untuk:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Malang yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan dan fungsi penunjang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Malang dengan kebijakan dan prioritas pembangunan di Provinsi dan Nasional, dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Timur dan Nasional tahun 2025;
3. Anggaran untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di tahun berdasarkan kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS;
4. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah;

5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Belanja bantuan keuangan partai politik ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Mempersiapkan anggaran untuk PPPK yang diangkat dari tenaga Non ASN Kabupaten Malang dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan.

Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 semula direncanakan sebesar 5 Triliun 104 Miliar 822 Juta 697 Ribu 913 Rupiah naik 0,39% atau sebesar 20 Miliar 119 Juta 699 Ribu 646 Rupiah menjadi sebesar 5 Trilyun 124 Milyar 942 Juta 397 Ribu 559 Rupiah yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer :

1. Belanja Operasi dan Belanja Modal

Semula direncanakan sebesar 4 Triliun 342 Miliar 167 Juta 583 Ribu 37 Rupiah naik 0,08% menjadi sebesar 4 Trilyun 345 Miliar 728 Juta 399 Ribu 407 Rupiah 70 Sen.

2. Belanja Tidak Terduga

Dianggarkan sebesar 3 Miliar 500 Juta Rupiah.

3. Belanja Transfer

Semula direncanakan sebesar 759 Miliar 155 Juta 114 Ribu 876 Rupiah naik 2,18 % menjadi sebesar 775 Miliar 713 Juta 998 Ribu 151 Rupiah 30 Sen

III. PEMBIAYAAN DAERAH

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya yang mengalami kenaikan 31,51% dari penyampaian awal sebesar 90 Miliar 954 Juta 652 Ribu 433 Rupiah menjadi 119 Miliar 616 Juta 304 Ribu Rupiah.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar 8 Miliar 600 Juta Rupiah.

Rapat Paripurna dan Hadirin sekalian yang berbahagia,
Badan Anggaran menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun keempat RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sebagaimana visi dan misi pasangan Kepala Daerah Kabupaten Malang terpilih yang tertuang dalam “Malang Makmur”, untuk membawa Kabupaten Malang menjadi lebih baik lagi. Diharapkan Arah Kebijakan Pembangunan KUA dan PPAS Kabupaten Malang pada Tahun 2025 disesuaikan dengan target RPJMD yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, maka Program Kegiatan Perangkat Daerah agar diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD Malang Makmur tersebut.
2. Dukungan infrastruktur dalam pengembangan pariwisata, pertanian secara luas lebih diperhatikan dengan harapan produksi pangan meningkat dan ketahanan pangan bisa terjaga serta peningkatan penunjang pariwisata di Kabupaten Malang.
3. Pemerintah Kabupaten Malang diharapkan lebih serius dalam menggali potensi pendapatan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis data dan kajian serta melakukan inovasi untuk mencapai target PAD pada tahun 2025.

Demikian hasil pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, kami harapkan Rapat Paripurna dapat menyetujui hasil pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana kami uraikan di atas menjadi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025. Sehingga dapat segera dilaksanakan pada tahapan-tahapan berikutnya sebagaimana ketentuan yang berlaku. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan meridhoi upaya-upaya kita dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.

Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada TAPD, Banggar dan segenap anggota dewan serta hadirin yang telah mengikuti jalannya kegiatan rapat paripurna ini dengan penuh perhatian, mudah-mudahan apa yang kita hasilkan bermanfaat dan sesuai harapan masyarakat Kabupaten Malang

Sekian dan terima kasih.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Thariq.

Wassalammualaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh, Syaloom, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Kepanjen, 15 Agustus 2024
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG

Ketua,


DARMADI, S.Sos

Juru Bicara,


Drs. MOKHAMAD FAUZI, M.Ag

FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN

KETUA

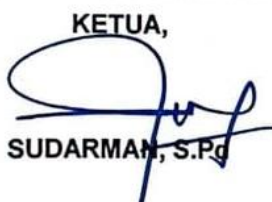
FATHUR ROHMAN, S.Pd

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

KETUA,

ALI MURTADLO, SH

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

KETUA,

SUDARMAN, S.Pd

FRAKSI PARTAI NASDEM

KETUA,

AMARTA FAZA, ST., M.Sos

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

KETUA,

MOCH. SAIFUL EFENDI, S.E.

BAPAK/IBU ANGGOTA DPRD DAN HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA,

BARU SAJA KITA IKUTI BERSAMA, PENYAMPAIAN HASIL PEMBAHASAN DPRD TERHADAP RANCANGAN KUA DAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2025.

KEPADA SAUDARA **Drs. MOKHAMAD FAUZI, M.Ag** SEBAGAI JURU BICARA DPRD, KAMI UCAPKAN TERIMAKASIH.

SAUDARA BUPATI, WAKIL BUPATI, JAJARAN FORKOPIMDA DAN HADIRIN SEKALIAN

MEMASUKI ACARA YANG SELANJUTNYA, YAITU PENYAMPAIAN PENDAPAT BUPATI MALANG TERHADAP RANCANGAN KUA DAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2025, DAN DILANJUTKAN DENGAN **PENANDATANGANAN** SERTA PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS.

KEPADA **SAUDARA BUPATI**, DIPERSILAHKAN....

.....Penyampaian Pendapat Bupati Malang terhadap Rancangan KUA PPAS TA.2025, Oleh Bupati Malang.....

....dilanjutkan dengan Penandatanganan serta penyerahan secara simbolis, dipandu oleh petugas....



***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua; Syaloom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan, Rahayu.***

**YANG TERHORMAT WAKIL BUPATI MALANG;
KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN MALANG;
PARA ANGGOTA FORKOPIMDA KABUPATEN MALANG
ATAU YANG MEWAKILI;
Pj. SEKRETARIS DAERAH, PARA STAF AHLI BUPATI,
PARA ASISTEN SEKDA, DAN PARA PEJABAT DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;
PARA WARTAWAN DAN HADIRIN UNDANGAN YANG
BERBAHAGIA.**

Mengawali sambutan pada rapat paripurna hari ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena sampai dengan hari ini, kita semua masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat kesempatan, dan nikmat kesejahteraan, untuk dapat melanjutkan ibadah kita, karya kita, tugas dan pengabdian kita, kepada masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman. Semoga dengan bersholawat kita akan menjadi insan yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah kelak. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD yang telah berkolaborasi dan bekerjasama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna menyelesaikan pembahasan dokumen Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025, sehingga pada hari ini dapat disetujui bersama dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan.

Kita semua tentu berharap agar semangat kerjasama dan kebersamaan ini, dapat terus terjaga dengan baik, sehingga kita dapat saling mendukung, saling mengisi dan saling melengkapi dalam rangka merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan, demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus kemajuan daerah Kabupaten Malang secara keseluruhan.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Dapat disampaikan bahwa proses pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 ini, telah dilaksanakan dalam suasana demokratis dan produktif, dalam rangka menyamakan persepsi terkait kebijakan umum dan usulan-usulan prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan program-program pembangunan di wilayah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2025. Adanya kesamaan pandang dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 ini, merupakan perwujudan komitmen yang baik dan positif dalam rangka keberlanjutan dan kesinambungan proses pembangunan di Kabupaten Malang, serta merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita bersama terhadap upaya peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran.

Namun demikian, perlu kita ketahui bersama, bahwa alokasi Pendapatan dan Belanja pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 ini masih bersifat sementara, mengingat belum adanya informasi resmi terkait penetapan alokasi pagu definitif terhadap sumber pendanaan melalui mekanisme transfer fiskal, baik dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu DAU, DAK, DBH Pajak, DBH SDA dan DBHCHT, maupun Pendapatan Transfer antar Daerah yaitu Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan

Keuangan dari Pemerintah Provinsi. Untuk itu, kita semua tentu berharap mudah-mudahan alokasi pagu definitif dimaksud dapat segera kita terima pada saat penyusunan atau pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 mendatang.

Lebih lanjut, dengan diselesaikannya pembahasan KUA dan PPAS yang dilakukan secara cermat, serta didukung dengan data dan informasi yang memadai, maka tahapan selanjutnya yaitu penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, baik dari sisi Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Daerah, yang diharapkan dapat diformulasikan secara efektif sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan RKPD Tahun 2025.

Secara garis besar Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 ini memuat kondisi ekonomi makro daerah sebagai asumsi dasar dalam penyusunan APBD, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah dan kebijakan Pembiayaan Daerah, serta strategi pencapaian target kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, disertai dengan proyeksi Pendapatan Daerah, alokasi Belanja Daerah, sumber dan penggunaan Pembiayaan. Adapun dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan serta pengalokasian Belanja Daerah tersebut, telah disinergikan dan diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, guna mendukung pencapaian prioritas pembangunan Nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal memberikan desain arah kebijakan dan merupakan salah satu acuan dalam penyusunan APBD. Hal tersebut dalam rangka mencapai keterpaduan dengan kebijakan fiskal Nasional yang antara lain berupa keselarasan target kinerja makro dan kinerja program, kepastian pendanaan program prioritas dan pemenuhan Belanja Wajib, serta keselarasan arah pelaksanaan anggaran.

Secara khusus tema atau fokus pembangunan Kabupaten Malang pada Tahun 2025 yaitu “Peningkatan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kebermanfaatan Teknologi yang Berkelanjutan”. Adapun 6 (enam) prioritas pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pengentasan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja dengan memperbaiki iklim investasi dan potensi daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi;
4. Peningkatan pelayanan publik melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif berbasis digital;
5. Terwujudnya masyarakat yang tentram, tertib dan rukun berlandaskan agama, nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal untuk mendukung stabilitas politik dan keamanan;
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Selanjutnya, dapat disampaikan pula asumsi dan perangkaan Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 yang telah dibahas bersama antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah sebesar Rp5.013.926.093.559,00, atau naik 7,06% dibanding APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.683.270.034.727,00. Adapun rincian Pendapatan Daerah meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.176.086.023.057,00;
 - b. Pendapatan Transfer sebesar Rp3.828.046.797.502,00;
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp9.793.273.000,00.
2. Belanja Daerah sebesar Rp5.124.942.397.559,00 atau naik 8,25% dibanding APBD Induk Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp4.734.425.715.285,00.
3. Selanjutnya, untuk Pembiayaan Daerah yaitu Penerimaan Pembiayaan diestimasikan sebesar Rp119.616.304.000,00, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp8.600.000.000,00. Sehingga, dari selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan diperoleh Pembiayaan Netto sebesar Rp111.016.304.000,00.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati ini nantinya digunakan sebagai acuan bagi Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran, untuk penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Untuk itu, saya minta agar seluruh Kepala Perangkat Daerah dapat segera mempersiapkan dengan baik dan cermat penyusunan dokumen RKA SKPD tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan batasan waktu yang ditetapkan.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Dengan telah dilaksanakannya penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, maka salah satu tahapan penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan terutama mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah telah dapat kita lakukan dengan baik dan lancar.

Kesepakatan bersama KUA dan PPAS ini tentu memiliki peranan penting dalam menentukan arah dan prioritas kebijakan pembangunan di Kabupaten Malang Tahun 2025. Selanjutnya menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk dapat menjalankan program pembangunan tersebut, guna memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat, serta untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bagi daerah Kabupaten Malang yang kita cintai ini.

Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap Pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, yang telah mengikuti penjelasan ini dengan penuh perhatian. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan petunjuk dan meridhoi segala upaya positif yang kita lakukan, dalam melaksanakan amanat pembangunan untuk masyarakat Kabupaten Malang yang kita cintai. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Wallaahul Muwaffiq ilaa Aqwamith Thoriiq,

Wassalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Syaloom, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Kepanjen, 15 Agustus 2024

BUPATI MALANG

Ttd.

Drs. H.M. SANUSI, M.M.







NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR: 180/ 9 /35.07.013/2024
 180/ 9 /35.07.100/2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini, Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H.M. SANUSI
Jabatan : Bupati Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 158 Kepanjen
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. a. Nama : DARMADI, S.Sos
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen
b. Nama : Ir. H. KHOLIQ
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen
c. Nama : MISKAT, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen
d. Nama : SODIKUL AMIN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Malang, 15 Agustus 2024



PIMPINAN DPRD KABUPATEN MALANG



MISKAT

SODIKUL AMIN



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

NOMOR: 180/ 60 /35.07.013/2024
 180/ 60 /35.07.100/2024

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini, Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H.M. SANUSI
Jabatan : Bupati Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 158 Kepanjen
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang,
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. a. Nama : DARMADI, S.Sos.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen
b. Nama : Ir. H. KHOLIQ
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen
c. Nama : MISKAT, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen
d. Nama : SODIKUL AMIN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Malang, 15 Agustus 2024



PIMPINAN DPRD KABUPATEN MALANG
Selaku,
PIHAK KEDUA



DARMADI
KHOLIQ

MISKAT

SODIKUL AMIN

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

BARU SAJA KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN PENDAPAT BUPATI MALANG TERHADAP RANCANGAN KUA DAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2025, SEKALIGUS DILANJUTKAN DENGAN PENANDATANGANAN.

KEPADA **SAUDARA BUPATI** DISAMPAIKAN TERIMAKASIH.

RAPAT PARIPURNA DPRD, BUPATI, WAKIL BUPATI DAN HADIRIN SEKALIAN,

DENGAN DEMIKIAN, SELESAI SUDAH SELURUH AGENDA RAPAT PARIPURNA HARI INI.

ATAS NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, KAMI SAMPAIKAN TERIMAKASIH KEPADA BADAN ANGGARAN DPRD DAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG YANG TELAH MENYELESAIKAN PEMBAHASAN.

KEPADA SAUDARA BUPATI, WAKIL BUPATI, JAJARAN FORKOPIMDA DAN HADIRIN SEKALIAN, KAMI MENGUCAPKAN TERIMAKASIH YANG TAK TERHINGGA, APABILA ADA HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN KAMI MOHON MAAF YANG SEIKHLAS – IKHLASNYA.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP SYUKUR “***ALHAMDULILLAHIROBILALAMIN***” RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG SAYA NYATAKAN DITUTUP**TOK!!! (3X)**

SEKIAN DAN TERIMA KASIH,

WALLAHULMUWAFIQ ILA AQWAMITTHORIQ,

WASSALAMU’ALAIKUM WR, WB.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
KETUA,**

DARMADI, S.Sos